

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Harsono, B., 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendie, B., 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. I*, Alumni, Bandung.
- Galudra, G, et al., 2006, *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA): Panduan Ringkas Bagi Praktisi*, World Agroforestry Center, Bogor.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chomzah, A, A., 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Parlindungan, A. P., 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Yogyakarta, Mandar Maju, Bandung.
- Santoso, U., 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah Cet. 2*, Kencana, Jakarta.
- Murad, R., 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik, Cetakan I*, Mandar Maju, Jakarta.
- Santoso, U., 2012, *Hukum Agraris : Kajian Komprehensif, Cetakan I*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sunggono, B., 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Penulisan Hukum**

Kirana, Margaretha Dewi, 2012, “*Sertipikat Ganda Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156/K/TUN/2005*”, Penulisan Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat.

## **C. Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.

Buku Petunjuk/*Standard Operating Procedure* (SOP) Petugas Ukur Kantor Pertanahan.

#### D. Internet

Wikipedia, “Bundle of Rights”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Bundle\\_of\\_rights](http://en.wikipedia.org/wiki/Bundle_of_rights), [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 8 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tumpang Tindih”, <http://kbbi.web.id/tumpang-tindih>, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada tanggal 8 Januari 2017 Pukul 20.40 WIB.

Investopedia, “Bundle of Rights”, <http://www.investopedia.com/terms/b/bundle-of-rights.asp>, [www.investopedia.com](http://www.investopedia.com), diakses pada tanggal 26 Maret 2017 Pukul 01.24 WIB.